

Analisis Penerapan Akuntansi dan Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM

**Fibaroina Nida Fatkhiyah¹, Rahman El Junusi², Nurudin³,
Faris Shalahuddin Zakiy⁴**

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

*Corresponding Author:

Fibaroina Nida Fatkhiyah

nidafibaroina@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the extent to which accounting records are applied and the use of accounting information for MSMEs. The research method used is a qualitative descriptive case study approach. The object of this study took 10 MSMEs registered in the financing of Bank BRI Syariah KCP Semarang. Collecting data from this study using interview methods, questionnaires, and documentation. The data obtained were triangulated and analyzed. The results of this study, that the application of accounting records and the use of accounting information on MSMEs registered in the financing of Bank BRI Syariah KCP Semarang has been implemented even though it is still simple in nature. MSMEs have made accounting recognition such as assets, liabilities, equity, income, and cost of goods and expenses. Financial reports are made in the form of cash flows and notes to financial statements. MSMEs have also used accounting information in the form of operational information, management information, and financial information to make decisions.

Keywords: Accounting; Accounting Information; MSMEs

Received
01-10-2020

Received in revised form
16-11-2020

Accepted
30-11-2020

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan pencatatan akuntansi dan penggunaan informasi akuntansi pada pelaku UMKM. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif pendekatan studi kasus. Objek dari penelitian ini mengambil 10 UMKM yang terdaftar pada pembiayaan Bank BRI Syariah KCP Semarang. Pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan metode wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Data yang diperoleh dilakukan triangulasi data kemudian dianalisis. Hasil dari penelitian ini, bahwa penerapan pencatatan akuntansi dan penggunaan informasi akuntansi pada UMKM yang terdaftar pada pembiayaan Bank BRI Syariah KCP Semarang telah diterapkan meskipun sifatnya masih sederhana. UMKM telah melakukan pengakuan akuntansi seperti aset, hutang, ekuitas, pendapatan dan harga pokok serta beban-beban. Laporan keuangan yang dibuat berupa arus kas dan catatan atas laporan keuangan. UMKM juga telah menggunakan informasi akuntansi berupa informasi operasi, informasi manajemen dan informasi keuangan untuk mengambil suatu keputusan.

Kata kunci: Akuntansi; Informasi Akuntansi; UMKM

PENDAHULUAN

Keberadaan bank syariah berada pada posisi sangat strategis di tengah-tengah penduduk mayoritas masyarakat Indonesia beragama muslim. Bank syariah berperan sebagai jembatan antara kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana (*agent of economic development*). Para pelaku usaha membutuhkan dana untuk membiayai investasinya atau modal yang diperoleh dari sektor rumah tangga yang mengalokasikan pendapatannya dengan menyimpan dana tersebut di bank syariah (Sofyan, 2016). Dalam laporan keuangan BRI Syariah 2018 menunjukkan produk pembiayaan dari tahun 2014-2018 terus mengalami kenaikan hingga mencapai 21,86 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal ini dikarenakan BRI Syariah berfokus pada pembiayaan modal usaha untuk mendorong keberlangsungan usaha dengan berbagai layanan dan produk yang ditawarkan.

Menurut data usaha mikro kecil dan menengah pada laporan tahun 2018 dari data pusat statistik yang dipublikasi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM mengungkapkan jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit dengan komposisi usaha mikro 98,6%, usaha kecil 1,2%, dan usaha menengah 0,09%. Dengan berkembangnya jumlah UMKM sejalan dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 97% serta menopang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 61%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa usaha yang menguasai sebagian besar usaha di Indonesia adalah usaha mikro. UMKM telah terbukti berkontribusi besar terhadap perekonomian di Indonesia.

Eksistensi UMKM telah diuji dan terbukti mampu bertahan ketika terjadi badai krisis ekonomi pada tahun 1998 dan 2008 serta menjadi roda penggerak ekonomi di Indonesia. Ketua Dewan Direktur CIDES (*Center for Information and Development Studies*) Rohmad Hadiwijoyo menyatakan faktor penyebab bertahannya UMKM dari krisis ekonomi yaitu UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, serta pelaku UMKM memanfaatkan sumber daya lokal (sumber daya manusia, modal, bahan baku, dan peralatan).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Negara dan Usaha Kecil dan Menengah bersama Badan Pusat Statistik tahun 2003, bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM yaitu permodalan sebesar 51%. Sedangkan 49% sisanya permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM berupa pemasaran, bahan baku, ketenagakerjaan, distribusi transportasi dan lainnya. Modal merupakan masalah paling banyak dialami oleh pelaku usaha. Salah satu solusi dalam mengeluarkan permasalahan tersebut bank syariah hadir dengan berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan untuk pelaku UMKM dengan memberikan suntikan dana pada modal usaha. Namun untuk mendapatkan modal usaha tersebut tidaklah tanpa alasan. Pelaku UMKM harus memenuhi berbagai persyaratan untuk mendapatkan modal usaha tersebut. Salah satu persyaratannya yaitu adanya transparansi dan akuntabilitas pada pencatatan akuntansi usaha.

Pencatatan akuntansi memiliki peran penting dalam menyediakan informasi keuangan sehingga dapat digunakan secara efisien untuk mengevaluasi kegiatan UMKM dan dalam pengambilan suatu keputusan (Afif & Nawirah, 2019). Dengan adanya proses kegiatan akuntansi seperti pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan maka pelaku UMKM dapat terhindar dari permasalahan usaha seperti kebangkrutan usaha dan mengambil langkah bijak dalam mengeluarkan keputusan usaha. Dengan adanya pencatatan keuangan dan penggunaan informasi akuntansi yang transparan dan akuntabel maka akan mendapatkan kepercayaan pihak perbankan syariah untuk memberikan pembiayaan dalam mengembangkan usaha.

Dengan adanya pencatatan akuntansi yang baik dan sesuai dengan standar (SAK EMKM) maka UMKM akan mampu mengambil keputusan bijak untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Sedangkan untuk penggunaan informasi akuntansi menurut Belkai (2006) memaparkan penggunaan informasi akuntansi dimanfaatkan sebagai pengambilan keputusan ekonomi dalam memilih diantara alternatif-alternatif tindakan. Sejauh mana UMKM melakukan pencatatan dan penggunaan informasi akuntansi menjadi tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada UMKM yang terdaftar pada nasabah pembiayaan UMKM bank BRI Syariah KCP Semarang.

TINJAUAN LITERATUR

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

UMKM telah memaparkan kriteria yang digunakan untuk masing-masing usaha dengan nilai kekayaan bersih atau nilai aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omset

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha kecil	> Rp 50 juta - Rp 500 juta	> Rp 300 juta - Rp 2,5 milyar
Usaha menengah	>Rp 500 juta - Rp. 10 milyar	> Rp 2,5 milyar - Rp 50 milyar

Sumber: Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV Pasal 6

Menurut Rahman (2008) dalam tulisannya telah mengelompokkan UMKM kedalam beberapa klasifikasi yaitu:

1. *Livehood activities*, merupakan usaha kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencaai nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, misalnya pedagang kaki lima (PKL).
2. *Micro enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small dynamic enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast moving enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

Konsep Akuntansi

Sebagai entitas bisnis, UMKM tentu saja membutuhkan akuntansi. Secara umum akuntansi dapat disimpulkan sebagai sebuah informasi akuntansi berupa laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*). Pengguna informasi akuntansi terbagi menjadi dua kelompok yaitu pemakai internal (*internal users*) dan pemakai eksternal (*eksternal users*). *Internal users* terdiri dari direktur dan manager keuangan, direktur operasional dan manager pemasaran, manager dan supervisor produksi. Sedangkan *eksternal users* terdiri dari investor, kreditor, pemerintah, badan pengawas pasar modal, serta ekonom, praktisi, dan analis.

Dalam perumusan prinsip dasar akuntansi terdapat beberapa konsep teori yang dipakai yaitu: 1) *Proprietary Theory*, yaitu entitas merupakan agen atau wakil dari pemilik (*proprietor*). Maka pusat perhatian dari pencatatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan adalah pemilik. Tujuan dari teori ini untuk menentukan kekayaan bersih yang menjadi hak pemilik. Persamaan akuntansinya: Aset - Kewajiban =

Ekuitas Pemilik. 2) *Entity Theory*, merupakan badan yang terpisah dan harus dibedakan dari kepemilikan. Entitas dianggap memiliki kekayaan dan kewajiban kepada *stakeholders*. Persamaan akuntansinya: Aset = Ekuitas. 3) *Fund Theory*, yaitu perhatian pencatatan akuntansi pada sekelompok aset yang penggunaannya telah dibatasi untuk membayar atau memenuhi sejumlah kewajiban tertentu. Teori ini menganggap entitas merupakan suatu unit dana untuk menetapkan kewajiban sebagai batasan penggunaan aset. Persamaan akuntansinya: Aset = Pembatasan Aset. 4) *Enterprise Theory*, yaitu pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan menjadi pusat perhatian penyajian informasi akuntansi. Pihak-pihak yang berkontribusi terhadap perkembangan, kemajuan, dan kesinambungan perusahaan. Penerapan dari teori ini berupa pelaporan akuntansi untuk sumber daya manusia, akuntansi lingkungan, dan akuntansi sosial ekonomi.

Informasi Akuntansi

Informasi akuntansi telah dipaparkan oleh Belkaoui (2006) bahwa informasi akuntansi sebagai data berupa angka-angka atau kuantitatif tentang entitas ekonomi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pengambilan keputusan ekonomi dalam memilih diantara alternatif-alternatif tindakan. Sedangkan menurut Susanto (2008) informasi akuntansi merupakan informasi sebagai dasar untuk evaluasi kinerja, sehingga dapat sebagai tolak ukur dalam memberikan *reward* atas kinerja manajerial. Dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi merupakan suatu proses, cara dan pemakaian suatu informasi berupa angka-angka akuntansi yang kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja suatu entitas.

Menurut Belkaoui (2006), informasi akuntansi digolongkan menjadi tiga jenis yaitu: 1) Informasi operasi, Informasi berupa data mentah, informasi operasi dapat berupa informasi produksi, pembelian, bahan baku, penggajian, penjualan. Informasi ini digunakan untuk menilai pelaksanaan kegiatan operasional secara keseluruhan, bagian-bagian maupun individu yang diberi wewenang dan tanggungjawab. 2) Informasi akuntansi manajemen, digunakan untuk kepentingan manajemen, fungsi manajemen dalam informasi digunakan untuk perencanaan, implementasi, pengendalian. Informasi akuntansi manajemen disajikan kepada manajemen dalam bentuk laporan seperti: laporan anggaran, laporan penjualan, laporan biaya produksi, laporan biaya menurut pusat pertanggungjawaban, laporan biaya menurut aktivitas, dan lain-lain. Informasi akuntansi bagi manajemen digunakan untuk menyusun perencanaan dan pengawasan terhadap operasional entitas atau jalannya entitas, mengevaluasi kinerja, dan melakukan koreksi jika diperlukan. 3) Informasi akuntansi keuangan, yaitu informasi akuntansi keuangan menyajikan informasi posisi keuangan, kinerja, dan perubahan keuangan suatu entitas sehingga dapat digunakan oleh manajer ataupun pihak eksternal dalam pengambilan suatu keputusan. Bagi pihak eksternal seperti pemerintah digunakan sebagai dasar penentuan pajak penghasilan dan dapat dijadikan sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional serta statistik lainnya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas entitas, selain itu informasi akuntansi dapat digunakan sebagai penilaian atas kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa.

Sedangkan menurut Holmes dan Nicholls (1988) dalam Tania (2008), menjelaskan klasifikasi informasi akuntansi dalam tiga jenis yang berbeda menurut manfaatnya bagi pemakai informasi akuntansi, yaitu: 1) *Statutory accounting information*, merupakan informasi yang harus disiapkan sesuai dengan peraturan yang ada. 2) *Budgetary information*, merupakan informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk anggaran yang berguna bagi pihak internal dalam perencanaan, penilaian, dan pengambilan keputusan. 3) *Additional accounting information*, merupakan informasi akuntansi lain yang disajikan perusahaan guna meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan manajer.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menerbitkan SAK EMKM yang ditujukan untuk UMKM agar dapat memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Pengguna SAK EMKM yaitu yang telah memenuhi karakteristik seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM bab IV pasal 6.

Apabila entitas telah menerapkan seluruh persyaratan terhadap SAK EMKM maka membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan maka harus konsisten, informasi dapat dibandingkan, dan lengkap. Laporan keuangan dalam SAK EMKM minimal terdiri dari Laporan posisi keuangan pada akhir periode, Laporan Laba Rugi Selama Periode, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap akun dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Penelitian terdahulu untuk mendukung pada penelitian saat ini seperti yang dijelaskan oleh Grand dan Rita (2016), bahwa UKM enting-enting gepuk Kota Salatiga dalam penggunaan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan bisnis bervariasi. 100% UKM telah menggunakan informasi akuntansi melalui pembelian bahan baku, penentuan harga jual, penambahan modal dan pelaksanaan produksi. Serta penelitian ini menghasilkan bahwa penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan dapat menunjang keberhasilan usaha pada UKM enting-enting gepuk Kota Salatiga. Berdasarkan jurnal tersebut yang membedakan adalah dalam penelitian yang akan ditulis penulis tidak hanya menganalisis dalam penggunaan informasi akuntansi namun juga menganalisis pada penerapan akuntansi UMKM.

Sejalan dengan penelitian Savitri dan Saifudin (2018), pencatatan akuntansi Mr. Pelangi Semarang dan hasil penelitian ini yaitu tidak adanya pencatatan akuntansi. Pencatatan yang dilakukan masih sederhana yaitu pencatatan pembelian bahan baku serta biaya yang dikeluarkan. Sehingga tidak diketahui seberapa besar biaya keseluruhan yang dibutuhkan dalam sekali produksi, dan mengetahui laba atau rugi pada setiap periode. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti belum mengetahui manfaat dari adanya pencatatan akuntansi dan belum memiliki pegawai yang khusus dalam pencatatan akuntansi. Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian yang akan dilakukan

tidak hanya meneliti tentang pencatatan akuntansi saja namun juga penggunaan akuntansi. Selain itu UMKM yang diteliti tidak hanya 1 namun juga ada 10 UMKM yang akan diteliti. UMKM tersebut merupakan UMKM yang terdaftar pada pembiayaan Bank BRI Syariah KCP Semarang Majapahit.

Penelitian Awalia, Yuliati dan Fauzi (2018), Hasil dari penelitian ini yaitu UMKM di Kecamatan Sekarbela telah menerapkan informasi akuntansi namun tidak diterapkan secara baik dan sifatnya masih sederhana. Penerapan pencatatan informasi melalui informasi operasi (catatan barang terjual, persediaan barang, dan pembelian barang), informasi manajemen (laporan anggaran, penjualan, biaya produksi, dan laporan aktivitas), dan informasi akuntansi keuangan (jumlah kas, pesediaan, hutang, modal, dan penjualan). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada penelitian ini hanya tentang penggunaan informasi akuntansi saja sedangkan penelitian yang akan diteliti akan mendeskripsikan tentang penerapan akuntansi dan juga penggunaan informasi akuntansi pada UMKM.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus berusaha meneliti suatu kasus atau fenomena yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif dan mendalam tentang suatu peristiwa atau aktivitas baik individu, kelompok, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Objek penelitian berjumlah 10 UMKM yang terdaftar pembiayaan pada Bank BRI Syariah KCP Semarang. Teknik pengamilan data meliputi wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data kemudian membuat kesimpulan yang berupa hasil penelitian serta terakhir melakukan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM yang terdaftar pada pembiayaan Bank BRI Syariah KCP Semarang telah melakukan penerapan pencatatan akuntansi. Namun pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh UMKM masih sederhana dan belum sesuai dengan SAK EMKM. Maksud dari pencatatan akuntansi yang sederhana disini yaitu UMKM belum mencatat dengan format akuntansi dengan standar SAK EMKM namun hanya berupa catatan seperti kas masuk dan kas keluar. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatar belakangi UMKM. Berikut ini memaparkan latar belakang 10 UMKM yang terdaftar pada pembiayaan Bank BRI Syariah KCP Semarang.

Tabel 2. Statistik Deskripsi Responden UMKM

Keterangan	Kategori	Jumlah	Prosentase
Gender Pemilik	Laki-laki	5	50%
	Perempuan	5	50%
Pendidikan	SD	1	10%
	SMP	1	10%
	SMA	4	40%
	S1	4	40%
Periode Usaha	< 5 Tahun	4	40%
	5-10 Tahun	4	40%
	>10 Tahun	2	20%
Jumlah Karyawan	< 5 Orang	6	60%
	5 - 19 Orang	4	40%
	>20 Orang	0	0%
Penghasilan Per Bulan	< 50 Juta	4	40%
	50 - 100 Juta	3	30%
	>100 Juta	3	30%

Sumber: Data diolah

Pencatatan keuangan pada UMKM yang terdaftar pada pembiayaan Bank BRI Syariah memiliki peran penting dikarenakan pencatatan keuangan merupakan syarat yang harus dilakukan oleh nasabah UMKM dalam memperoleh pembiayaan. Pencatatan akuntansi digunakan sebagai bukti transaksi yang diberikan ke pihak bank untuk penentuan bagi hasil yang telah ditetapkan. Berikut ini data pencatatan akuntansi pada UMKM yang terdaftar di pembiayaan Bank BRI Syariah KCP Semarang.

Tabel 3. Tabel Pencatatan Keuangan UMKM

Keterangan		Jumlah	Prosentase
Pencatatan Setiap Transaksi	Ya	10	100%
	Tidak	0	0%
Pengetahuan Sistem Akuntansi	Ya	7	70%
	Tidak	3	30%
Adanya Sistem Akuntansi	Ya	7	70%
	Tidak	3	30%
Keinginan Penerapan Sistem Akuntansi	Ya	9	90%
	Tidak	0	0%
Penyimpanan Bukti Transaksi	Ya	10	100%
	Tidak	0	0%

Sumber: Data diolah

Kondisi keuangan UMKM merupakan pengakuan berupa aset atau kekayaan yang dimiliki oleh UMKM baik dalam bentuk uang maupun aset seperti bangunan, kendaraan, tanah, hak paten, dan lain-lain. Kondisi keuangan juga dapat dilihat dari kepemilikan hutangnya baik kepada kreditor, pajak, atau pihak lainnya. Kondisi keuangan lainnya yaitu berupa ekuitas atau modal kepemilikan dari UMKM, pengakuan pendapatan dan perhitungan harga pokok baik produksi maupun penjualan, dan pengakuan beban-beban yang dikeluarkan UMKM.

Aset

Berikut ini pengakuan aset oleh UMKM:

Tabel 4. Pengakuan Aset UMKM

Keterangan		Jumlah	Prosentase
Transaksi Penjualan	Tunai	10	100%
	Kredit	0	00%
Penjualan Bahan Baku	Ya	4	40%
	Tidak	6	60%
Pembelian Barang Jadi	Ya	4	40%
	Tidak	6	60%
Penjualan Barang Jadi	Ya	5	50%
	Tidak	5	50%
Kepemilikan Aset Tetap	Ya	10	100%
	Tidak	0	0%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data di atas, 100% UMKM melakukan transaksi penjualan secara tunai. Hal ini dilakukan untuk menghindari penerimaan kas yang ditanggihkan yang dapat menimbulkan konsumen gagal bayar dan menyebabkan kerugian usaha. 40% UMKM melakukan penjualan bahan baku sebagai pemasukan kas. 40% UMKM juga membeli barang jadi yang kemudian dijual kembali. 50% UMKM menjual barang jadi kepada konsumennya. Seluruh UMKM atau 100% UMKM memiliki aset tetap atas kepemilikan pribadi. Hal ini dinilai bagus bagi UMKM karena telah mengalokasikan keuntungan usaha untuk membeli aset tetap atas kepemilikan usaha sehingga dapat mengurangi beban sewa dan menambah jumlah aset atau kekayaan usaha.

Utang

Daftar pengakuan utang UMKM adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Pengakuan Utang

Keterangan		Jumlah	Prosentase
Pembelian Secara Kredit	Ya	4	40%
	Tidak	6	60%
Pembayaran Pajak Penjualan	Ya	6	60%
	Tidak	4	40%
Hutang	Ya	8	80%
	Tidak	2	20%

Sumber: Data diolah

UMKM memilih untuk melakukan pembelian secara tunai sebesar 60%. Hal ini dikarenakan UMKM mencari aman agar terhindar dari jatuh tempo pada tanggal yang telah ditentukan. Setiap UMKM wajib melaporkan penghasilan usaha ke kantor pajak, namun terdapat 4 dari 10 UMKM yang tidak melakukan pembayaran pajak penjualan. Meskipun demikian seluruh UMKM wajib dalam melengkapi dokumen legalitas usaha sebagai syarat pembiayaan. Dokumen tersebut seperti SIUP, SKU, Surat Pasar, dan NPWP. 80% UMKM memiliki hutang terhadap pihak lain. Pengakuan hutang dapat berupa modal usaha, pembelian dengan ditanggihkan, atau hutang terhadap aset tetap.

Ekuitas

Pengakuan ekuitas UMKM adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Pengakuan Ekuitas

Keterangan		Jumlah	Prosentase
Modal Pribadi	Ya	8	80%
	Tidak	2	20%
Penarikan untuk Kepentingan Pribadi	Ya	7	70%
	Tidak	3	30%
Keuntungan sebagai modal selanjutnya	Ya	10	100%
	Tidak	0	0%

Sumber: Data diolah

Bentuk kepemilikan usaha dengan modal pribadi yaitu 8 UMKM. Sedangkan 2 UMKM merupakan bentuk kerjasama dimana modal usaha tidak hanya dari pemilik saja. 70% UMKM melakukan penarikan tunai dari hasil usaha UMKM untuk keperluan pribadi. Hal ini sebaiknya tidak dilakukan pemilik karena dalam pencatatan usaha harus memisahkan antara keperluan atau keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Namun dikarenakan modal usaha adalah milik pribadi maka pemilik dapat mengambil keuntungan dari usahanya. Dalam akuntansi hal ini diakui sebagai prive artinya pemilik UMKM mengambil dana untuk keperluan pribadi sehingga mengurangi modal.

Selanjutnya yaitu pengakuan keuntungan yang diperoleh UMKM pada data di atas menunjukkan 100% atau seluruh UMKM telah menerapkan keuntungan yang diperoleh dijadikan modal usaha untuk kegiatan UMKM selanjutnya. Hal ini baik karena dengan begitu perputaran usaha akan terus dapat berjalan dan berkembang. Keuntungan usaha juga dapat digunakan untuk pembelian aset tetap bagi UMKM agar menambah jumlah aset atau dapat juga digunakan untuk investasi seperti pembelian tanah.

Pendapatan dan Harga Pokok

Pengakuan pendapatan dan harga pokok oleh UMKM adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Pengakuan Pendapatan dan Harga Pokok

Keterangan		Jumlah	Prosentase
Menghitung Harga Pokok Produksi	Ya	10	100%
	Tidak	0	0%
Menghitung Harga Pokok Penjualan	Ya	10	100%
	Tidak	0	0%
Pemberian diskon	Ya	3	30%
	Tidak	7	70%
Retur Barang Penjualan	Ya	2	20%
	Tidak	8	80%

Sumber: Data diolah

Dalam pencatatan akuntansi setiap pendapatan harus diakui dan dimasukkan kedalam akun kas. 100% UMKM telah menghitung harga pokok produksi dan harga pokok penjualan pada setiap barang atau jasa yang diperjualkan. Menghitung harga

pokok baik produksi maupun penjualan penting dilakukan setiap UMKM, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah setiap pengeluaran dan beban yang dikeluarkan sekali memberikan barang atau jasa yang dijual.

Tujuan dari penghitungan harga pokok baik produksi maupun penjualan yaitu agar mengetahui berapa realisasi harga yang telah dikeluarkan, dapat menentukan laba atau rugi setiap penjualan dan penentuan dalam memutuskan suatu harga serta jumlah pengambilan keuntungan. Dalam UMKM hanya 30% yang memberikan diskon penjualan. Diskon penjualan merupakan strategi bagi UMKM agar dapat menaikkan penjualan. Namun dalam pemberian diskon harus memperhitungkan jangan sampai memberikan diskon sehingga dapat merugikan usaha.

Hal ini yang tidak dilakukan oleh 70% UMKM dalam melakukan diskon penjualan, pelaku UMKM mencari aman untuk tidak memberikan diskon untuk menghindari kerugian usaha. Padahal, pemberian diskon dengan perhitungan yang tepat dapat menarik konsumen baru sehingga masyarakat datang untuk mencoba produk atau jasa yang ditawarkan. Pemberian diskon juga dapat dilakukan kepada konsumen yang langganan pada UMKM untuk menjalin kerjasama yang baik dengan konsumen. Pemberian diskon juga dapat sebagai *reward* karena konsumen telah melakukan pembelian dalam jumlah partai besar.

Dalam penjualan dapat terjadi kemungkinan retur barang penjualan. Retur barang penjualan memiliki arti bahwa konsumen dapat mengembalikan barang yang telah dibelinya kepada penjual. Retur dapat terjadi apabila barang rusak atau tidak sesuai pesanan. Namun hanya 2 dari 10 UMKM yang menerima retur penjualan. Hal ini dikarenakan seluruh UMKM melakukan penjualan tunai dan secara langsung sehingga dikesepakatan awal akad atau didalam tulisan kwitansi tertulis barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan kecuali terdapat kesepakatan diawal.

Beban

Berdasarkan hasil kuesioner di atas menunjukkan bahwa 100% atau seluruh UMKM telah melakukan pengakuan beban dengan mencatatnya. Setiap UMKM memiliki beban dan pengeluaran yang berbeda-beda tergantung pada keadaan usahanya. Bagi UMKM yang memiliki karyawan maka melakukan pencatatan beban gaji pegawai. Seluruh UMKM mengakui beban seperti pembayaran telpon, listrik, dan air. Setiap terdapat pengeluaran untuk transportasi seperti pembelian persediaan barang dagang atau pengiriman barang penjualan juga dicatat oleh setiap UMKM. Bagi UMKM yang tidak memiliki aset tetap dan harus menyewa tempat maka UMKM juga akan mengakui beban sewa. Barang dagang dan mesin yang harus ada perawatan khusus juga diakui sebagai beban perawatan.

Setelah pengakuan setiap transaksi dan dilakukan pencatatan akuntansi maka tahap selanjutnya yaitu membuat laporan keuangan. Berikut ini data UMKM yang melakukan laporan keuangan.

Tabel 8. Laporan Keuangan UMKM

Keterangan		Jumlah	Prosentase
Laporan Laba / Rugi	Ya	4	40%
	Tidak	6	60%
Laporan Perubahan Ekuitas	Ya	0	0%
	Tidak	10	100%
Neraca	Ya	0	0%
	Tidak	10	100%
Laporan Arus Kas	Ya	10	100%
	Tidak	0	0%
Catatan Atas Laporan Keuangan	Ya	9	90%
	Tidak	1	10%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan menunjukkan bahwa 100% UMKM telah membuat laporan keuangan berupa arus kas. Hal ini merupakan kewajiban bagi setiap UMKM yang terdaftar pada pembiayaan bank BRI Syariah untuk menunjukkan laporan keuangan setiap periode berupa aliran masuk dan keluar setiap transaksi. Namun bentuk laporan keuangan yang dilakukan tidak mewajibkan 5 bentuk laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian laporan keuangan yang dilaporkan pihak nasabah UMKM ke pihak bank berupa laporan arus kas dengan bentuk sederhana. Laporan arus kas terdiri dari aliran kas masuk dan kas keluar dalam satu periode. UMKM melakukan pengakuan kas dengan *cash basis* dimana melakukan pencatatan pada saat menerima kas dan mengeluarkan kas. Meskipun semua UMKM melakukan laporan arus kas namun hanya 40% UMKM yang membuat laporan laba rugi.

Berbagai alasan yang dipaparkan oleh UMKM melakukan penyajian laporan keuangan yaitu untuk mengetahui dan melaporkan jumlah pemasukan dan pengeluaran. Bagi UMKM laporan keuangan juga dapat mengetahui bagaimana keadaan UMKM apakah mengalami keuntungan atau kerugian. Namun semua UMKM merasa belum memerlukan akan pentingnya membuat 4 laporan keuangan lainnya seperti laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Setiap UMKM memiliki kewajiban untuk melaporkan arus kas untuk dilaporkan kepada pihak bank syariah yang telah memberikan pembiayaan.

SAK EMKM yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah yang disusun dan disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Dari 10 data kuesioner terdapat 1 data yang tidak valid karena tidak mengisi kuesioner bagian SAK EMKM. Berdasarkan data seluruh UMKM tidak mengetahui apa itu SAK EMKM. Mereka semua juga menjawab bahwa tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Ini dikarenakan pihak Bank BRI Syariah KCP Semarang tidak mewajibkan pelaporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Pelaku UMKM menganggap bahwa belum memerlukan laporan sesuai standar, padahal laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dapat memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan karena SAK EMKM diterbitkan untuk UMKM agar dapat mudah memahami dan mengimplementasikan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standard yang berlaku.

Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM

Dalam menganalisis penggunaan informasi akuntansi pada akuntansi maka diperlukan tolak ukur. Tolak ukur digunakan sebagai landasan dalam menganalisis. Alat ukur yang digunakan merupakan teori dari Belkaoui (2006). Berikut ini tabel alat ukur dalam menggunakan informasi akuntansi pada UMKM:

Tabel 9. Alat Ukur Penggunaan Informasi Akuntansi Menurut Belkaoui (2006)

Infomasi Akuntansi	Klasifikasi Informasi Akuntansi	Informasi Akuntansi UMKM	Keputusan Bisnis
Informasi Operasi	Informasi produksi, informasi pembelian, informasi bahan baku, informasi penggajian, dan informasi penjualan.	Buku kas masuk, buku kas keluar, buku penjualan, buku hutang, buku piutang, dan buku pembelian.	Menilai pelaksanaan kegiatan operasional secara keseluruhan.
Informasi Manajemen	Informasi perencanaan, informasi implementasi, dan informasi pengendalian.	Laporan gaji karyawan dan laporan persediaan.	Menyusun perencanaan dan pengawasan serta evaluasi dan koreksi kinerja.
Informasi Keuangan	Informasi laporan keuangan	Laporan laba/rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.	Bagi pelaku usaha untuk pengambilan keputusan ekonomi, mengetahui stabilitas, dan profitabilitas usaha. Bagi pihak eksternal digunakan sebagai penentuan pajak dan data statistik UMKM.

Sumber: Data diolah

Informasi Operasi

Berikut ini data penggunaan informasi operasi UMKM:

Tabel 10. Data Penggunaan Informasi Operasi

Keterangan		Jumlah	Prosentase
Buku Kas Masuk	Ya	10	100%
	Tidak	0	0%
Buku Kas Keluar	Ya	10	100%
	Tidak	0	0%
Buku Hutang	Ya	2	2%
	Tidak	8	80%
Buku Piutang	Ya	2	20%
	Tidak	8	80%
Buku Penjualan	Ya	8	80%
	Tidak	2	20%
Buku Pembelian	Ya	2	20%
	Tidak	8	80%

Sumber: Data diolah

Informasi operasi merupakan informasi yang berisi data mentah yang digunakan untuk menginformasikan bagi informan keuangan dan informan manajemen. Berdasarkan hasil kuesioner menyatakan bahwa seluruh UMKM melakukan pencatatan di buku kas masuk dan kas keluar. Namun tingkat pencatatan dibuku hutang, piutang, dan beli hanya 20% UMKM yang melakukannya. 80% telah melakukan menggunakan informasi melalui buku penjualan.

Berdasarkan data di atas, bahwa UMKM menggunakan informasi operasi melalui buku kas masuk dan kas keluar. Namun tingkat penggunaan informasi operasi mealui buku hutang, piutang dan pembelian masih rendah. Padahal dalam keputusan usaha yang diambil melalui informasi operasi dapat menentukan tingkat biaya semua kegiatan usaha yang telah dilakukan. Namun UMKM hanya mencatatat dibuku dengan pencatatan sederhana berupa kas masuk dan kas keluar. Menurut Arif Rahman selaku Pimpinan Cabang, hal ini dikarenakan dalam pencatatannya UMKM memerlukan banyak waktu dan biaya. Minimal dengan pencatatan dibuku kas masuk dan buku kas keluar maka UMKM dapat menggunakan informasi tersebut sebagai informasi operasi untuk kebijakan aktivitas usaha.

Informasi Manajemen

Berikut ini data penggunaan informasi manajemen:

Tabel 11. Data Penggunaan Informasi Manajemen

Keterangan		Jumlah	Prosentase
Laporan Gaji Karyawan	Ya	8	80%
	Tidak	2	20%
Laporan Biaya Produksi	Ya	4	40%
	Tidak	6	60%
Laporan Persediaan	Ya	8	80%
	Tidak	2	20%

Sumber: Data diolah

Tujuan dari penggunaan informasi manajemen ini khusus ditujukan untuk manajemen dalam menentukan kebijakan yang akan dikeluarkan. Menurut data di atas menunjukkan 80% telah menerapkan laporan gaji karyawan dan laporan persediaan untuk digunakan sebagai informasi manajemen. Namun tingkat penggunaan informasi manajemen bagian laporan biaya produksi masih rendah yaitu hanya 40% UMKM. Keputusan usaha dari penggunaan informasi manajemen yaitu untuk menentukan akan rencana dan suatu bentuk pengawasan akan jalannya operasional usaha. Informasi manajemen juga digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi akan tindakan yang perlu dilakukan kedepannya (Afif & Nawirah, 2019).

Informasi Keuangan

Berikut ini data penggunaan informasi keuangan UMKM:

Tabel 12. Data Penggunaan Informasi Keuangan

Keterangan		Jumlah	Prosentase
Laporan Laba / Rugi	Ya	4	40%
	Tidak	6	60%
Laporan Perubahan Modal	Ya	0	0%
	Tidak	10	100%
Neraca	Ya	0	0%
	Tidak	10	100%
Arus Kas	Ya	10	100%
	Tidak	0	0%
Catatan Atas Laporan Keuangan	Ya	9	90%
	Tidak	1	10%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa penggunaan informasi keuangan berupa arus kas yaitu 100% dan tingkat tertinggi ke dua yaitu penggunaan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan tingkat penggunaan laporan laba rugi hanya 40% saja. Selebihnya UMKM tidak ada yang menggunakan informasi keuangan berupa laporan perubahan modal dan neraca.

Informasi keuangan digunakan oleh pihak internal maupun eksternal usaha. Tujuan dari informasi keuangan yaitu untuk mengetahui posisi keuangan, kinerja usaha, dan pengambilan suatu keputusan usaha. Informasi keuangan pada UMKM dapat mengetahui stabilitas dan profitabilitas UMKM.

Dalam UMKM yang terdaftar pada pembiayaan bank syariah peran informasi keuangan memiliki peran penting untuk menentukan bagi hasil. Namun kesadaran UMKM dalam menggunakan informasi keuangan berupa laporan selain arus kas masih rendah. Hal ini dikarenakan UMKM merasa belum memerlukan menerapkan semua laporan keuangan untuk informasi keuangan. Menurut Arif Rahman selaku Pimpinan Cabang, hal ini juga dikarenakan tidak adanya kewajiban bagi nasabah UMKM yang menerima pembiayaan untuk menerapkan seluruh laporan keuangan, namun untuk pertanggungjawaban pembiayaan nasabah UMKM hanya diwajibkan pelaporan berupa laporan arus kas. Sehingga UMKM telah menggunakan informasi keuangan melalui laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Penerapan pencatatan akuntansi dan penggunaan informasi akuntansi pada UMKM telah dilakukan meskipun bentuknya sederhana. Hal ini dikarenakan UMKM yang terdaftar pada pembiayaan Bank BRI Syariah KCP Semarang adalah UMKM yang terdapat laporan keuangan dengan transparan dan akuntabel. Pihak perbankan syariah juga harus memfilter UMKM yang mendapatkan pembiayaan dengan melakukan analisis UMKM. Analisis tersebut berupa karakter yaitu dengan mengecek slip serta histori, *trade checking* yaitu dengan melakukan penelusuran melalui tetangga, *supplier*, dan *buyer*. Kemudian analisis *capacity* dengan mengetahui keuntungan bersih pada setiap periode sehingga dapat menentukan jumlah bagi hasil dari bersihnya yaitu 30% untuk pihak perbankan syariah, setelah itu ada analisis *condition* dengan mengecek atas kepemilikan harta dan aset yang dimiliki oleh UMKM. Terakhir yaitu analisis pada jaminan yang diberikan yaitu 70% dari pembiayaan yang akan diberikan.

Analisis dilakukan pihak perbankan untuk memastikan benar-benar mengenal dan layak UMKM mana yang akan menerima pembiayaan. Bank BRI Syariah KCP Semarang melakukan berbagai analisis nasabah UMKM. Setelah melakukan analisis maka pihak perbankan syariah dapat menentukan apakah nasabah UMKM menerima pembiayaan atau tidak. Bagi nasabah yang layak menerima dana pembiayaan dari perbankan untuk nasabah UMKM, maka pihak perbankan syariah mengutus AO (*Account Officer*) sebagai *connector* pihak perbankan kepada pihak nasabah UMKM.

Setelah pencairan dana pembiayaan maka AO akan melakukan pendampingan. Peran AO sangat penting karena sebagai penghubung pihak perbankan syariah dengan nasabah UMKM. AO akan memonitoring UMKM dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi antara pihak perbankan syariah dengan UMKM dan bentuk pendampingan setelah pencairan pembiayaan. Kemudian AO juga akan mengecek apakah alokasi dana pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama. AO juga akan mengambil tindakan dan solusi apabila terjadi gejala pembiayaan bermasalah terhadap nasabah UMKM.

SIMPULAN

Penerapan pencatatan akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah yang terdaftar pada pembiayaan bank BRI Syariah KCP Semarang telah dilakukan. UMKM juga telah melakukan penyimpanan bukti setiap transaksi. Namun pencatatan yang dilakukan masih sederhana. Dapat dilihat dengan pencatatan berdasarkan kas masuk dan kas keluar. Tingkat dalam penggunaan sistem akuntansi pada UMKM pun masih rendah. UMKM juga telah melakukan pengakuan akuntansi seperti aset, hutang, ekuitas, pendapatan dan harga pokok, serta beban-beban. Laporan keuangan yang dibuat semua UMKM berupa arus kas dan hampir semuanya membuat catatan atas laporan keuangan, sedangkan kesadaran akan pembuatan laporan lainnya seperti laba rugi, perubahan modal, neraca masih rendah. Hal ini dikarenakan UMKM mempertanggungjawabkan atas pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah berupa laporan arus kas. Namun pembuatan laporan arus kas masih sederhana dan belum sesuai dengan SAK EMKM. Hal ini dikarenakan seluruh UMKM menyatakan ketidaktahuan tentang SAK EMKM dan belum pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan pencatatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

UMKM yang terdaftar pada pembiayaan bank BRI Syariah KCP Semarang telah menggunakan informasi akuntansi. Penggunaan informasi operasi dilakukan dalam menentukan tingkat biaya dan pengambilan keputusan akan aktivitas usaha. UMKM menggunakan informasi operasi melalui buku kas masuk dan kas keluar. Sedangkan UMKM dalam penggunaan informasi manajemen digunakan untuk bahan evaluasi dan koreksi usaha. Penggunaan informasi manajemen melalui laporan gaji karyawan dan laporan persediaan. UMKM telah menggunakan informasi keuangan untuk mengetahui kinerja usaha dan posisi keuangan. Penggunaan informasi keuangan melalui laporan arus kas. Sedangkan penerapan laporan lainnya masih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Awalia, N., Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2018). Penerapan Informasi Akuntansi pada UMKM di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 2(2).
- Afif, I. R., & Nawirah. (2019). Design of financial statement preparation based on SAK EMKM using microsoft excel. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 2(1), 141-152. doi: <http://dx.doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.1.5156>
- BRI Syariah. (2018). *Laporan Tahunan 2018*.
- Christian, A. B. G., & Rita, M. R. (2016). *Peran Penggunaan Informasi Akuntansi Dalam Pengambilan Keputusan Untuk menunjang Keberhasilan Usaha*, EBBANK.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.
- Hery. (2009). *Teori Akuntansi*. Jakarta: Kencana.
- https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah, diakses pada tanggal 18 Januari 2020.
- <http://www.depkop.go.id/data-umkm>, diakses pada tanggal 19 Januari 2019.
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2012/03/28/11093274/Tiga.Hal.yang.Buat.U> MKM.Tahan.Krisis, diakses tanggal 20 Januari 2020.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementrian Keuangan. (2012). *Kebijakan Antisipasi Krisis Tahun 2012 Melalui Program Kredit Usaha Rakyat*. www.kemenkeu.go.id.
- Kirowati, D., & Amir, V. (2019). Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Laporan Keuangan di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Madiun). *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 4(1).
- Mamang, E. et al. (2010). *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nazir, M. (1985). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, M. (2004). *Siklus Akuntansi*. Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara.

Permatasari, N. U. (2015). *Analisis Penerapan Akuntansi Pada UMKM di Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon*. Doctoral Dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Probosari, D. (2013). Praktik akuntansi dan implikasinya pada kualitas informasi (sebuah studi pada UMKM). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2).

Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Savitri, R. V. (2018). Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada UMKM Mr. Pelangi Semarang). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 5(2).

Sinambela, L. P. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sofyan, S. (2016). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 10(2).

Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1

Wijaya, D. (2018). *Akuntansi UMKM*. Yogyakarta: Gava Media.

Yusup, H. (2011). *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1*. Yogyakarta: STIE YKPN.